

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asmah. 2017. *Hukum Persaingan Usaha "Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia*. Makassar; SIGn.
- B3EI UII. 2008. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta; Grafindo Persada.
- Binoto Nadapdap. 2020. *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta; Kencana.
- Hani Handoko. 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya*. Jakarta; Rafika Aditam.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta; Grasindo.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Leo Agustino. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta.
- M. Manullang. 1997. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung; Rafika Aditama.
- Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta; Grafindo Persada.
- Rahmawati Sururama. Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintah*. Bandung; Cendekia.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Jakarta; Rajawali Pres.
- Rosmawat. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung; Kencana.
- Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta; Ghalia Indonesia.



Susanti Andi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*. Jakarta; Kencana.

Toman Sony Tambunan. Wilson R.G. Tambunan. 2020. *Hukum Bisnis*. Jakarta; Kencana.

Tulus T.H. Tambunan. 2013. *Perekonomian Indonesia (Kajian Teoritis dan Analisis Empiris)*. Jakarta; Ghalia Indonesia.

Victor M. Situmorang. Jusuf Juhir. 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta; Rineka Cipta.

SKRIPSI DAN TESIS

Ahmad Husein. 2018. *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Juwita Purnama Sari. 2018. *Kajian Yuridis Kedudukan dan Fungsi Pengawasan KPPU Sebagai Komisi Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muhammad Fadloly. 2011. *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Perspektif Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Sopi. 2013. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Kantor Bea Cukai Tipe Madya*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Bandung.

JURNAL

Alya Anindita Maheswari. 2022. *Batasan, Wewenang, dan Keterlibatan KPPU dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha*. Jurist Diction. Vol.3 No.5.

Baiq Evina Sapitri. 2015. *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha*. Jurnal IUS. Vol.3 No.5.



Muh Risnain. 2024. *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usah*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.3 No.1.

Rai Mantili. Hazar Kusmayanti. Anita Afriana. 2016. Problematika Penegakan *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). Vol.3 No.1.

PERATUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaa

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pasal 50 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha



WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Hasiholan Pasaribu, selaku Ketua Bidang Kajian dan Advokasi di KPPU Kantor Wilayah VI, pada 21 September 2023 pukul 11.02 WITA

ARTIKEL INTERNET

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. 2015. Deskripsi Konsep (DPD) "Sistem Perekonomian Nasional". Sumber: <https://www.dpr.go.id/prolerpgnas/deskripsi-konsep3/id/155> diakses pada 03 September 2023. Pukul 21.00 WITA.

Kementerian Bappenas. 2024. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Sumber: <https://indonesia2045.go.id/aspirasi> diakses pada tanggal 10 Maret 2024. Pukul 19.43 WITA.

Pengadilan Agama Kuningan. 2021. Pedoman Pengawasan. Sumber: <https://www.pa-kuningan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi/pedoman-pengawasan> diakses pada tanggal 23 Juli 2023, Pukul 22.21 WITA.



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 2804/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 557/UN4.5.1/PT.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ADITYA RISBAYU ESA
Nomor Pokok : B021191039
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KOTA
MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Februari s/d 12 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 05 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



